

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdul Aziz dkk, *Teori Hukum Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Elvaretta Buana, 2024.
- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003
- Abdul Khakim, *Dasar - Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Andi M Ramly, *Peta Pemikiran Karl Marx: Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis*, Yogyakarta, LKIS Pelangi Aksara
- Ayu sukorini, *Dibalik Undang - Undang Cipta Kerja*, Jakarta, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian keuangan RI, 2021
- Bagir Manan, *Politik Perundang – undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, Bandar Lampung, FH UNILA, 1996
- Bernard L.Tanya, *Yoan N.simanjuntak dan Markus Y Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010
- C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung, Alumni, 2006, hal; 139
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Yogyakarta*, Yogyakarta, Balai Pustaka, 1989
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Yogyakarta, Raja Grafindo Persada, 2006,
- Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Yogyakarta, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Bandung, Alfabeta, 2009
- GøstaEsping-Andersen, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Princeton University Press, 1990

- Gøsta Esping-Andersen , *Welfare States and Welfare State Theory*, Center for Comparative Welfare Studies, Working Paper
- Ida Hanifah, *Hukum Ketenagakerjaan di Yogyakarta*, Medan, Pustaka Prima, 2020
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Yogyakarta, Djambatan, 1992
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Sinar Grafika, 2009
- Khuzairah Dimiyati dkk, *Geneologi Negara: Hegemoni Koorporatokrasi Negara Hukum Kesejahteraan Yogyakarta*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2020
- Lamijan, *Upah Kerja dan Keadilan; Suatu Tinjauan Teoritis*, Banyumas, Pena Persada, 2021
- Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB, Mataram University Press, 2020
- Oksidelfa, *Negara Hukum; Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2020
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Kencana Prenada, 2006
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Yogyakarta*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2011
- Phlippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Yogyakarta*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hal; 69
- Salim HS dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013
- Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014
- Sendjun Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Yogyakarta*, Yogyakarta, Rineka Cipta, 2001
- Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004
- Sigit Riyanto, *Kertas Kebijakan; Catatan Kritis Terhadap UU Yogyakarta. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Yogyakarta, Edisi 2, 2020
- Sihotang, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Pradnya Paramita, 2007

- Sipayung, P. D. Dkk, *Hukum Ketenagakerjaan*, Medan, Yayasan Kita Menulis, 2022
- Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Elsam, 2002
- Soerjono Soekanto , *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta*, Rajawali Press, 1986
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2003
- Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif ; Akademia Pustaka, Konsep Prinsip dan Operasional*, Tulungagung, 2018
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, Bandung, Nusa Media, 2020
- Zainal Asikin, *Dasar - Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008

Hasil Penelitian

- Budiono, “Penetapan Upah Minimum dalam Kaitannya dengan Upaya Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaan”, Tesis, Semarang; Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007
- Desmiwati, “Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Upah Buruh di Indonesia (Analisis Upah Minimum Provinsi Tahun 2001-2008)”, Tesis, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Program Studi Magister Perencanaan Kebijakan Publik, 2010.
- Fitrianingsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak - Hak Pekerja Dalam Undang - Undang Cipta Kerja”, Tesis, Tarakan, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, 2021

Jurnal

- Agus surya, “Kajian Yuridis Terkait Penentuan Besaran Upah Pekerja” 2022, Vol.8
- Aji Halim, “Sistem Upah Berdasarkan Prinsip Keadilan dalam Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare state)“, Vol. 3, 2023
- Ardhian Kurniawati, “Implementasi kebijakan pengupahan di Industri Perhotelan”, vol. 14 2019
- Arrista, “Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja”, Vol.5, 2014
- Chika Agishintya “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terhadap Pemberian Upah dibawah Upah Minimum” Vol.7, 2021

- Cecilia Ayu, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Untuk Mendapatkan Upah Minimum Menurut PERPPU nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja”, Vol. 5, 2024
- Christin Lady, “Analisa Hukum Ketenagakerjaan tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang - Undang No. 13 Tahun 2003”, Vol.6, 2018
- Cipta Indralestari, “Korelasi Konsep Negara Kesejahteraan Menurut GØsta Esping-Andersen Dengan Pancasila Dalam Pengaturan Otonomi Daerah di Indonesia”, Vol.1, 2023
- Devanto, “Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian yang Berkeadilan ; Tinjauan UUD 1945”, Vol.5, 2011
- Dewa Gede Atmaja, “Asas - Asas Hukum Dalam Sistem Hukum” , Vol. 12, 2018
- Dinar Titus, “Direktur Pengupahan, Kemenaker Bimbingan Teknis Penyusunan Struktur dan Skala Upah Jakarta”, Vol, 2, 2021
- Dino Rizak, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, Vol. 6, 2023
- Erwien Adisiswanto, “Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Perusahaan”, Vol.3, 2015
- Eva dkk, “Tinjauan Yuridis UU Cipta Kerja Terhadap Pengupahan Yang Layak Era Pandemi Covid-19”, Vol.1, 2023
- Faris al suddes, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja atas Penetapan Upah Di bawah Upah Minimumdi PT X Kota Tangerang berdasarkan Permenaker No 18 Tahun 2022 tentang
- Hari Agus, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU”, Vol. 36, 2021
- Hidayat, “Penyelenggaraan Upah Minimum Kabupaten di Indonesia Perspektif Kebijakan Publik” Vol. 5, 2017
- Iskandar, “Dampak Undang - Undang Cipta Kerja Terhadap Upah Minimum di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ekonomi dan Sosial”, Vol.15, 2021
- Ida bagus gede, “Kajian Yuridis terkait dengan penentuan besar upah pekerja berdasarkan pasal 88C Undang - Undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja”, Vol. 4, Tahun 2022
- Ismayati, “Kritiki Filsafat Hukum Positivisme sebagai upaya mewujudkan hukum yang berkeadilan”, Vol. 1, 2018

- I Wayan Gde Wiryawan, “Dilematika Kebijakan Upah Minimum Dalam Pengupahan Indonesia”, Vol.1, 2016
- Mario Juliyanto, “Dasar - Dasar Pemikiran Hukum” , Vol. 01, 2019
- Marsudi, “Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila”, Vol.23, 2021,
- Melisa dkk, “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia” , Vol. 1, 2017
- Muhammad Zubi, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak - Hak Normatif Tenaga Kerja setelah berlakunya Undang - Undang cipta kerja (Omnibus law)”, Vol. 3, 2021
- Muhamad Abas, “Dampak Hilangnya Upah Minimum Sektorial Bagi Pekerja Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan” Vol. 2, 2022
- Mardani, “Penerapan Upah Minimum di Indonesia Perspektif Keadilan Sosial” Vol. 7, 2018
- Nabiyla, “Tinjauan Penetapan Upah Minimum 2023; Evaluasi Kebijakan Pengupahan dan Revitalisasi Dewan Pengupahan”. Vol. 52, 2023
- Nur Fatah Abidin, “Penilaian Pembelajaran Sejarah Konstruktivistik Pendekatan metode CDA”, Vol. 1, 2017
- Oman Sukmana, “Negara Kesejahteraan”, Vol.2, 2016
- Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 Jo UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja”, Vol. 4, 2024
- Patrick Winson, “Pengaruh Undang - Undang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Upah Minimum Pekerja” Vol.7, 2023
- Rama Mahesa, “Dilema Pemberlakuan PP. No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan: Disparitas Yang Kian Melebar”, Vol. 1, 2019
- Santoso, “Implikasi Kebijakan Upah Minimum Pasca Pemberlakuan Undang - Undang Cipta Kerja: Perspektif Pembangunan Ekonomi”, Vol.19, 2021
- Setiawan, “Analisis Kebijakan Upah Minimum di Indonesia. Jurnal Politik Indonesia”, Vol. 4,2019
- Sinta Lamira, “Kedudukan Dewan Pengupahan Dalam Menentukan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota”, Vol.12, 2023

Suhartoyo, “Perlindungan Hukum Mengenai Pengupahan Terhadap Pekerja/Buruh Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu” , Vol. 3, 2020

Sunu pribadi, “Welfare state di Australia Pasca Perang Dunia 2”, vol. 5, 2018

Sudrajat, “Upah Minimum Regional di Indonesia: Implikasi terhadap Kesejahteraan Pekerja Informal”, Vol. 23, 2018

Syarifa Mahila, “Kebutuhan Hidup layak dan pengaruhnya terhadap penetapan upah minimum provinsi ditinjau dari hukum ketenagakerjaan”, Vol. 2 tahun 2014

Winda Roselina, “Konsep Welfare state di Indonesia” , vol. 5, 2023

Wibowo, ‘Tinjauan Kritis terhadap Dampak Undang - Undang Cipta Kerja terhadap Upah Minimum di Indonesia: Perspektif Kesejahteraan Sosial. Vol.7,2021

Yudi Latif dkk, Tim Riset PSKIK, “Negara Kesejahteraan dan Globalisasi” Jakarta, Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, 2008

Yetniwati, “Pengaturan Upah Berdasarkan Prinsip Keadilan”, Vol.29, 2017

Zulfahmi nur, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)”, Vol.6 , 2023

Peraturan Perundang - undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang - Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Jo PERPPU No. 2 tahun 2022 Jo Undang - Undang no. 6 tahun 2023 Lembar Negara tahun .2023, Nomor. 41, TLN No.6856,.

Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembar Negara Tahun 2003 Nomor.39, TLN NO.4279,

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2000, Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Lembar Negara Tahun. 2001, Nomor. 131, TLN NO. 3989

Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Lembar Negara Tahun 2008, Nomor.93, TLN NO.4866

Undang - Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Lembar Negara Tahun. 2004/ No. 150, TLN NO. 4456

Undang - Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Lembar Negara Tahun.2011/No. 116, TLN No. 5256

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Lembar Negara Tahun. 2012/No. 158, TLN No. 5336

Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Lembar Negara Tahun 2014/No. 244, TLN No. 5587.

Undang – Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembar Negara Tahun 2007/NO.67, TLN NO.4724.

Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Lembar Negara Tahun 2021; Nomor.46, TLN No.6648,

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Lembar Negara Tahun 2023 Nomor.146, TLN (6899)

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Lembar Negara Tahun 2021/No.44, TLN No.6646

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Lembar Negara Tahun 2021/No.47, TLN No.6649

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

Kemenakertrans No. 226/Men/2000 Tentang Perubahan Permenaker No. 1 tahun 1999 Tentang Upah Minimum.

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan

Permenaker No 1 tahun 1999 Tentang Upah Minimum

Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Rosmalia Dewi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, Karawang, 7 Juni 2024, Pukul ; 14.15

Hasil wawancara dengan Abdul Syukur, Ketua APINDO Kabupaten Karawang, Karawang, Tanggal 24 Mei 2024, Pukul 14.00

Seminar

Gama Yogotomo, “Industrial Relation Update”, Jakarta, Seminar Astra Daihatsu Motor Supplier Club, 8 May 2024

Website/Internet

Advokat Konstitusi “ Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia“ , <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/2/> diakses 14 April 2024

Binus University, “Selayang Pandang Peraturan Ketenagakerjaan dan Kepentingan di Dalamnya”<https://business-law.binus.ac.id/2016/07/24/selayang-pandang-peraturan-ketenagakerjaan-dan-kepentingan-di-dalamnya/> diakses 16 April 2024

Biro Pusat Statistik “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,32 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,18 juta rupiah per bulan”
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2002/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-32-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-18-juta-rupiah-per-bulan.html> diakses pada 5 April 2024

CNN Indonesia, “Daftar 4 Provinsi Tanpa Kenaikan Upah Minimum Pada 2022”
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211115183417-92-721543/daftar-4-provinsi-tanpa-kenaikan-upah-minimum-pada-2022> diakses 24 April 2024

CNBC Indonesia, “Demo Buruh: Kenaikan Upah Buruh 15% Harga Mati”
<https://www.cnbciindonesia.com/news/20231027153438-4-484277/demo-buruh-kenaikan-upah-buruh-15-harga-mati> diakses 8 April 2024

Data Boks, “1.250 Perusahaan Melanggar UMP, Terbanyak di Jawa Barat”
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/29/1250-perusahaan-melanggar-ump-terbanyak-di-jawa-barat> diakses 20 April 2024

Data Boks, “24,8 Juta Karyawan Terima Gaji di Bawah UMP pada Agustus 2023”
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/25/248-juta-karyawan-terima-gaji-di-bawah-ump-pada-agustus-2023> diakses 16 April 2024

Data boks “10 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Dunia Pertengahan 2023”
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/28/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-dunia-pertengahan-2023> diakses pada 5 April 2024

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “DPR RI Setujui RUU PERPPU Ciptaker Jadi Undang - Undang”
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43720> diakses pada 5 April 2024

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, “Perubahan Formula Perhitungan Kebijakan UMP 2024 Dorong Peningkatan Daya Beli Masyarakat”
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47458/t/javascript>; diakses 16 April 2024

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Pekerja Informal Dominasi Angka Pekerja, Kurniasih Dorong Hadirnya PBI BPJS Ketenagakerjaan,”
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46160/t/Pekerja%20Informal%20Dominasi%20Angka%20Pekerja,%20Kurniasih%20Dorong%20Hadirnya%20PBI%20BPJS%20Ketenagakerjaan#:~:text=Sedangkan%20untuk%20pekerja%20sektor%20formal%20sebanyak%2055%2C29%20juta%20orang.>
Diakses 24 April 2024

Disanakertrans Kab. Sanggau, “ Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan”
<https://disnakertrans.sanggau.go.id/peraturan-perundangan-ketenagakerjaan/> diakses 16 April 2024

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, “Dialog Peninjauan Komponen dan Jenis KHL”
<https://nakertrans.kulonprogokab.go.id/detil/2161/dialog-peninjauan-komponen-dan-jenis-khl> diakses 24 April 2024

Fakultas Hukum UMSU, “Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh”
<https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/> diakses 8 April 2024

Fair Work Comision, ‘Legislation and regulations’,
https://www-fwc-gov-au.translate.goog/about-us/legislation-and-regulations?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=sc diakses 24 April 2024

Fair Work Ombudsman, “Hospitality Industry (General) Award 2020”
<https://library.fairwork.gov.au/award/?krm=MA000009> diakses 24 April 2024

Hukum Online, “Aturan Upah Minimum Dalam UU Cipta Kerja Terbaru, Begini Penjelasannya”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-upah-minimum-dalam-uu-cipta-kerja-terbaru--begini-penjelasannya-lt64e34fbeddd4f/> diakses 8 April 2024

Indonesia Baik, “11 Klaster Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja”
<https://indonesiabaik.id/infografis/11-klaster-peraturan-pelaksanaan-uu-cipta-kerja> diakses 16 April 2024

International Labor Organization, “What is a minimum wage ; Definition and purpose”
https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/definition/WCMS_439072/lang--en/index.htm diakses 16 April 2024

- International Labor Organization, “The logic behind different minimum wage systems”
<https://www.ilo.org/resource/21-logic-behind-different-minimum-wage-systems> diakses 16 April 2024
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “ROI vs IRR: Dua Ukuran Profitabilitas yang Membantu Investor Membuat Keputusan”
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15254/ROI-vs-IRR-Dua-Ukuran-Profitabilitas-yang-Membantu-Investor-Membuat-Keputusan.html> diakses 24 April 2024.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Pemerintah dan Ahli Sebut UU Cipta Kerja Memiliki Manfaat Besar”
https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_dan_ahli_sebut_uu_cipta_kerja_memiliki_manfaat_besar diakses 24 April 2024
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun”
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816> diakses pada 5 April 2024
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Ahli: Pemberian Upah Minimum Kepada Pekerja Bersifat Wajib”,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11759> diakses 8 April 2024
- Ministry Of Manpower, “Median Concepts and Definitions”
<https://stats.mom.gov.sg/SL/Pages/Median-Concepts-and-Definitions.aspx> diakses 19 April 2024
- National Public Works Council, “Lists the National Public Works Council (NPWC) conditions of contract and tendering”
<https://nt.gov.au/industry/procurement/understanding-the-rules/conditions-contract/construction/national-public-works-council> diakses 24 April 2024
- Omni, “Philippines Minimum Wage Guide for Employers”
<https://omnihr.co/philippines-minimum-wage/> diakses 24 April 2024
- Pemerintah Provinsi Banten, “Gubernur Banten : Penetapan UMP/UMK Mengacu Pada Regulasi”
<https://biroadpimpro.bantenprov.go.id/berita/gubernur-banten-penetapan-umpumk-mengacu-pada-regulasi> diakses 8 April 2024
- Penelitian Ilmiah, “Pengertian Manfaat Praktis dan 3 Contohnya”
<https://penelitianilmiah.com/manfaat-praktis/> diakses 8 April 20224
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia “Pemerintah Terbitkan 49 Peraturan Pelaksana Undang - Undang Cipta Kerja <https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-49-peraturan-pelaksana-Undang - Undang-cipta-kerja/> diakses pada 5 April 2025

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia “Pemerintah Terbitkan PERPPU Cipta Kerja” <https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja/> diakses pada 5 April 2024

University Of Melbourne, “Australia’s national minimum wage should become a “living wage”, according to a new campaign from the Australian Council of Trade Unions (ACTU), What is a Living Cost?”, <https://fbe.unimelb.edu.au/newsroom/explainer-what-exactly-is-a-living-wage> diakses 24 April 2024

Wage Indicators, “ Wage and Work” <https://wageindicator.org/labour-laws/labour-law-around-the-world/minimum-wages-regulations/minimum-wages-regulations-philippines> diakses pada 24 April 2024

